

Jurnal ISSN 1907-316X
Logos Spectrum

Volume 9, No 2, April - Juni 2014

**Efektifitas Angkutan Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat
Di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud
Selfie Wowor**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Gizi Pada Masyarakat Desa Pesisir Di
Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara
Juliana Tumiwa**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pelayanan Publik
Evie A. A. Suwu**

**Kajian Kinerja Aparatur Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Billy Kristian Kereh**

**Kinerja DPRD Dalam Bidang Pengawasan Pembangunan,
Suatu Studi Di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
Novie Palar**

**Kontribusi Banjar Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Transmigrasi Etnik Bali
Di Desa Werdi Agung
I Nengah Punia**

**Pengembangan Sumberdaya Manusia Untuk Meningkatkan
Taraf Hidup Masyarakat Petani
Nelly Elsje Waani**

**Prostitusi Dan Kemiskinan
(Lokalisasi Desa Sumberpucung Kabupaten Malang)
Benedicta Joselin Mokalu**

**Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemukiman Kumuh
(Studi Kasus Kelurahan Sindulang I, Kecamatan Tuminting Kota Manado)
Nicolaas Kandowanko**

**Teknologi Komunikasi Dan Perubahan Sosial
Juliana Lumintang**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI**

Jurnal				Manado	ISSN
	Vol 9	No 2	Hal 78 - 171		
Logos Spetrum				April - Juni 2014	1907-316X

ISSN 1907-316X

JURNAL LOGOS SPECTRUM

Volume 9, No 2, April – Juni 2014

KOMPOSISI PERSONALIA JURNAL LOGOS SPECTRUM

Pelindung

Dekan Fisip Unsrat
Philep M. Regar

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Sosiologi
Nicolaas Kandowangko

Pemimpin Umum/Redaksi

Anthonius Purwanto

Redaktur Pelaksana

Hendrik W. Pongoh

Dewan Redaksi

Benedicta J. Moku
Hendrik W. Pongoh
I Nengah Punia
Fonny J. Waani
Eveline J.R. Kawung
Shirley Y.V.I. Goni

Mitra Bebestari

Basri Amin
(Univ. Gorontalo)
Yustinus Slamet Antono
(STFT. St.Yohanes. Pematang Siantar)

Editor Eksekutif

John Dewey Zakarias

Administrasi Keuangan

Evie A.A. Suwu

**Diterbitkan Oleh : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat
Manado, bekerja sama dengan penerbit Media Pustaka Manado**

JURNAL LOGOS SPECTRUM

VOLUME 9, NO 1, JANUARI - MARET 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- ii

DAFTAR ISI -- i

Efektifitas Angkutan Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud -- 78
Selfie Wowor

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Gizi Pada Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara -- 89
Juliana Tumiwa

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pelayanan Publik -- 94
Evie A. A. Suwu

Kajian Kinerja Aparatur Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. -- 104
Billy Kristian Kereh

Kinerja DPRD Dalam Bidang Pengawasan Pembangunan, Suatu Studi Di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. -- 109
Novie Palar

Kontribusi *Banjar Adat* Dalam Kehidupan Masyarakat Transmigrasi Etnik Bali Desa Werdi Agung. -- 125
I Nengah Punia

Pengembangan Sumberdaya Manusia Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Petani. -- 138
Nelly Elsje Waani

Prostitusi Dan Kemiskinan (Lokalisasi Desa Sumberpucung Kabupaten Malang). -- 148
Benedicta Joselin Mokalau

Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Sindulang I, Kecamatan Tuminting Kota Manado). -- 153
Nicolaas Kandowanko

Teknologi Komunikasi Dan Perubahan Sosial. -- 161
Juliana Lumintang

Jurnal				Manado	ISSN
	Vol 9	No 2	Hal 78 - 171		
Logos Spetrum				April -Juni 2014	1907-316X

Prostitusi Dan Kemiskinan (Lokalisasi Desa Sumberpucung Kabupaten Malang)

Benedicta Joselin Mokalua

Dosen Pada Program Studi Sosiologi Fispol Unsrat

Abstract

Prostitution in Indonesia has grown in step with the development of information technology and facilities. With a variety of motives prostitutes using the internet to offer themselves. Openness era of mobility and facilitate the transaction has to penetrate traditional barriers. Poverty scapegoats of the emergence of a lot of prostitution. In Malang, there are about seven brothels. With regard to the potential of natural resources and human resources as well as good practices that exist in religious rituals in Sumberpucung, the existence of prostitution that has survived for 56 years is certainly a rarity.

According to local government officials and members of parliament, prostitution is difficult to remove because the government can not provide jobs for former prostitutes and pimp. They also argued that the brothel will facilitate monitoring of the spread of HIV / AIDS and also to prevent prostitutes roam. This suggests that a majority government does not care about the community, even indirectly preserve and allow the practice of prostitution.

Keywords : Prostitution, government, poverty, brothel.

PENDAHULUAN

Kata pelacuran atau prostitusi secara umum kedengarannya tidak lazim bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di mana pola hidup masih kental dengan ajaran agama, norma budaya dan adat istiadat serta hukum. Dalam masyarakat Indonesia : (1) profesi pelacur dipersepsikan sama dengan perempuan walaupun kenyataan ada juga pelacur laki-laki (gigolo), (2) pelaku "bisnis maksiat" (germo, pelacur) adalah salah satu kelompok masyarakat yang marginal, (3) perempuan dalam konstruksi budaya asia juga di Indonesia dari etnis-etnis tertentu memiliki posisi tawar yang sangat lemah dan tidak bisa menolak permintaan hubungan intim dengan suami sehingga mereka rawan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS dan PMS (Penyakit Menular Kelamin) dibandingkan dengan laki-laki, (4) perempuan menikah di Indonesia mencari pemuasan seks dengan pasangan lain relatif kecil selain pelacur dengan laki-laki.

Pertanyaan sering didengungkan oleh pihak pemerhati masalah pelacuran ialah; "mengapa praktek pelacuran bisa bertahan selama 56 tahun di Sumberpucung, dan Bagaimana kondisi perekonomian warga Sumberpucung ?"

Dario Agnote (1998) menyebutkan bahwa di

Indonesia uang yang beredar di dunia prostitusi ini mencapai 1,2 hingga 3,3 milyar dolar AS pertahun, atau mencapai 0,8 hingga 2,4 persen dari GDP Indonesia. Di Jakarta, uang yang dihasilkan dari industri ini mencapai angka 191 juta dolar AS pertahun. Ketika terindustrialisasi, lingkaran prostitusi secara sadar memiliki kecenderungan untuk terus bertahan dan mengembangkan dirinya. Muhammad Farid (1998) dalam bukunya memaparkan bahwa ada sekitar 650.000 perempuan terperangkap dalam industri hitam (pelacuran).

Tujuan penelitian

- Mendeskripsikan sejarah keberadaan prostitusi selama 56 tahun (2010).
- Mendeskripsikan hubungan potensi SDA dan SDM dengan prostitusi di desa Sumberpucung.
- Mendeskripsikan pro dan kontra dengan keberadaan prostitusi Sumberpucung.

METODE PENELITIAN

Deskripsi kualitatif – snow ball

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuntjoro (2004), banyak para ahli telah berusaha merumuskan definisi pelacur yang memadai. Namun demikian kompleksnya persoalan pelacuran, akhirnya tidak ada satu definisi pun yang berhasil memenuhi harapan

itu. Tabet (1989) dan Phaterson (1990) misalnya, menggolongkan pelacuran sejenis perburuan seks perempuan yang membentuk suatu kontinum, dari mulai pertukaran jangka pendek uang dan seks, barang dan seks, hingga pertukaran jangka panjang seks dengan pelayanan domestik dan reproduksi seperti dalam pernikahan. Memperoleh uang.

Kartini Kartono (2005), pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan. Sedang *prostitute* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah lain, wanita tuna susila (WTS).

a. Sekilas Prostitusi Sumberpucung

Selama 56 tahun bertahan mustahil jika tanpa campur tangan 'kekuasaan'. Para mucikari tidak punya kuasa, warga tidaklah mungkin toleran dengan warga pendatang berbisnis 'maksiat'. tapi Lokasi prostitusi masih tetap bertahan ditengah pendapat pro kontra warga. Warga yang mengaku selama ini hanya menerima dampak negatif, di antaranya : dicap desa pelacuran, anak-anak gadis dianggap pelacur. Arogansi kekuasaan tercermin awal reformasi (1998/1999), terjadi konflik antara warga pendukung MUI dengan warga pendukung lokalisasi. Kelompok warga pendukung MUI menghendaki agar warga pendukung MUI menghendaki : (1) lokalisasi tetap ada, dan lokalisasi harus dikelola oleh warga, (2) jika lokalisasi ditutup pemerintah Kabupaten Malang harus menyediakan lapangan pekerjaan pengganti bagi warga masyarakat yang menggantungkan pencarian dari lokalisasi. Akibat dari konflik ini, lokalisasi sempat ditutup sekitar tiga bulan setelah itu dibuka kembali. Sejak tahun 1999 hingga 2010, status lokalisasi menjadi "abu-abu". Maksudnya, tidak dilarang tapi juga tidak ada izin beroperasi, Taniman (ketua dusun suku 24). Guna menghindari timbul konflik terbuka antara warga maka PEMDA menerbitkan Surat Instruksi NO 3 Tahun 2002 Bupati Malang.

Lokalisasi

Rumah-rumah bordir mudah dikenal, diberi cat warna terang kombinasi krem, digantungkan neon box bertuliskan sutra,

yang diambil dari kata Kondom Sutra. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan pada Don Juan dan pelacur supaya selalu tetap menggunakan kondom merek sutra. Luas bangunan rata - rata 5 x 12 m², memiliki 5 -7 kamar tidur dengan luas kamar masing-masing 1,5 x 2 m, dilengkapi MCK dengan ukuran 2 x 2 m, kamar tidur mucikari ukuran 2,5 x 3 m, ruang tamu 1,5 x 3 m, ruang makan 1,5 x 2 m, serta sebuah dapur ukuran 1,5 x 2 m. menggunakan air sumur mesin pompa merek sanyo dan penerangan menggunakan listrik PLN. Rumah-rumah yang tidak menerima pelacur ditulis "Rumah Tangga". Artinya tidak menerima pelayanan pelacur. Posisi rumah-rumah bordir tepat di sisi kiri kanan jalan. Para pelanggan berjalan mengamati pelacur sudah berdandan rapi dengan cermat mengamati para pangeran hidung belang yang mondar-mandir di depan rumah sambil mengumbar senyum birahi.

Para penikmat dari arah kota Malang atau dari Kabupaten Blitar yang mau ke lokalisasi ini sangat mudah. Jika ingin mengendarai Bus atau Oplet turun di depan Kantor Koramil / Kantor Camat Kecamatan Sumberpucung atau di depan Balai Desa Sumberpucung. Ada abang becak dan ojek yang siap menghantar pengunjung menuju lokalisasi dengan harga Rp.10.000 buat becak atau ojek. Setelah tiba di lokasi akan dilayani petugas "pengelola keamanan". Para pelanggan diberikan kondom sutra serta beberapa peraturan, di antaranya adalah "dilarang membawa senjata api, dilarang membawa senjata tajam serta, tidak boleh mabuk-mabukan selama di lokalisasi".

Biaya

Setiap pelanggan atau Don Juan di kenakan tarif Rp. 50.000 (2009) dan sejak 2010 tarif berubah menjadi Rp. 80.000, dengan waktu pelayanan 30 menit. Jika pelanggan membutuhkan waktu ekstra diatur langsung dengan pelacur. Pelacur menyerahkan iuran keamanan sebesar Rp. 8.000/tamu tahun (2009), menjadi Rp. 10.000/tamu tahun (2010) untuk mucikari, Rp. 8.000/tamu tahun (2009), dan Rp. 10.000/tamu tahun (2010). seluruh Uang keamanan dikumpulkan oleh koordinator

Prostitusi Dan Kemiskinan
(Lokalisasi Desa Sumberpucung Kabupaten Malang)

lokasi (Purnomo) untuk kemudian akan dibagikan kepada para petugas keamanan lokalisasi bahkan jika memungkinkan akan dibagikan untuk semua ketua RT (jarang dilakukan).

Pelacur

Purnomo koordinator keamanan lokalisasi menjelaskan pada tahun 2009, jumlah pelacur sekitar 70 orang pada musim sepi, dan 200 orang pada musim ramai. Pelacur yang ada di lokalisasi Sumberpucung berasal dari kota sekitar Jawa Timur. Tidak ada pelacur dari desa Sumberpucung demikian halnya dengan mucikari serta penikmat/Don Juan. Pada tahun 2010 jumlah pelacur sekitar 80 – an orang pada musim ramai.

b. Hubungan Potensi SDA Dan SDM Dengan Prostitusi Sumberpucung

Desa Sumberpucung, antara lain :

1. Potensi dari desa Sumberpucung sesungguhnya tidak termasuk desa miskin, alasan : (1) Rata-rata setiap keluarga punya lahan pertanian, (2) Sebagian besar tanah pertanian (milik) dikelola oleh buruh tani ataupun oleh penggarap. Angkatan kerja produktif merantau ke luar Jawa mencari uang halal.
2. Tidak ada pelacur dan mucikari berasal dari warga Sumberpucung.
3. Kehidupan sosial, religiusitas warga terasa sangat kontras jika menyaksikan hiruk-pikuk penikmat dan penjaja seks berseliweran di tengah kampung.
4. Kebertahanan lokalisasi prostitusi tidak ada manfaatnya bagi mayoritas warga kecuali bagi 20-an orang yang selama ini memanfaatkan lokalisasi.
5. Mayoritas warga tidak sepaham bahwa kebertahanan prostitusi demi ekonomi warga. Selama 56 tahun warga tidak pernah diberi tahu jika ada iuran dari lokalisasi.
6. Kebertahanan lokalisasi berkaitan erat dengan kekuasaan.

Veronika dan Lilik S. serta beberapa warga lain juga sependapat menyikapi prostitusi, antara lain :

1. Kades dan aparat desa diakui pihak yang paling berkompeten dengan

aspek ekonomi.

2. Sosial psikologis, warga terutama anak gadis tidak berani mengaku sebagai orang suko atau warga Sumberpucung oleh karena sering-kali mereka dilecehkan.
3. Warga cemas dengan kesehatan menghadapi penyakit HIV/AIDS.
4. Orang tua mengalami kesulitan untuk mengajarkan nilai-nilai moral sementara di depan mata terjadi penyimpangan moral.

Sumarsono memandang kebertahanan prostitusi selama 56 tahun sebagai faktor penyebab adalah :

1. Lemah peran tokoh agama. Mayoritas warga kompleks agama islam tapi tidak ada yang mempersoalkan keberadaan prostitusi tersebut.
2. Peran politisi hanya penggembira pada saat hajatan PILKADA atau PILPRES. "Sebagai corong rakyat, politisi lokal harus berani tampil, tidak hanya pada waktu PILKADA, atau PILPRES atau PILKADES lima tahun sekali atau hanya berani jika sebagai anggota dewan. Ia adalah corong hidup maka harus sungguh-sungguh berperan dan berfungsi sebagai corong di mana setiap saat (1 x 24 jam) berteriak menyuarakan suara warga, jika tidak mau menjadi corong sumbang / tidak berguna / tidak terpakai.

Kondisi diam dan tidak peduli dengan realitas sebagai kecenderungan umum manusia dalam menghadapi berbagai macam tekanan dan kebutuhan material, kebendaan, maupun kebutuhan yang non material. Penulis sependapat dengan Abraham Maslow yang mengklarifikasikan kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan, yang selanjutnya disebut hierarki kebutuhan sebagai berikut.

- a) Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar bagi manusia (*basic needs*) – pakaian, perumahan, makan,
- b) Kebutuhan jaminan keamanan (*safety needs*)
- c) Kebutuhan bersifat sosial (kesempatan mengekspresikan kemampuan, bakat dan diterima orang lain),

- d) Kebutuhan yang bersifat penghargaan atau pengakuan (rasa bangga atas kekayaan, kedudukan, status sosial)
- e) Kebutuhan akan kesempatan untuk mengembangkan diri *self actualization* inilah kebutuhan yang paling tinggi dari manusia.

Soemardjan (1980) kemiskinan itu sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dalam masyarakat bersangkutan. Tingkat standar hidup yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Soemardjan (1982) berkesimpulan bahwa dari penyebabnya kemiskinan dibedakan menjadi tiga jenis kemiskinan yaitu : (1) kemiskinan kultural, (2) kemiskinan sumberdaya ekonomi, (3) kemiskinan struktural.

Dalam jangka panjang, pewarisan kemiskinan antar generasi ini juga akan didukung oleh proses sosialisasi nilai. Situasi kemiskinan yang telah terlalu lama mencekam suatu kelompok dapat saja membentuk budaya kemiskinan sebagai suatu sub-budaya yang kemudian akan membentuk nilai-nilai khas yang erat hubungannya dengan masalah-masalah kemiskinan dan usaha manusia untuk mengadaptasikan diri dengan situasi tersebut (Susanto, 1984). Nilai semacam ini kemudian dapat tersosialisasikan kepada generasi yang berikutnya melalui kehidupan keluarga.

Angka kemiskinan Indonesia sekitar 35 juta (2009) sementara tahun 2011 katanya kurang 10% orang miskin. Dari angka tersebut, 63,58 persen dari rakyat miskin adalah rakyat yang tinggal di pedesaan di mana 70 persennya adalah rakyat tani. Kondisi ini telah mengakibatkan semakin menipisnya insentif dari sektor pertanian yang akhirnya mendorong peningkatan angka pengangguran dan juga angka urbanisasi selanjutnya prostitusi. Angka pengangguran telah meningkat dari 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 10,28 persen pada tahun 2006.

Dari angka tersebut, pengangguran di pedesaan mencapai 5,4 persen artinya dari

keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya urbanisasi yang mencapai angka 41 persen pada tahun 2005, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri setiap tahunnya yang justru menambah masalah ketenagakerjaan dan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan pedesaan. Hardiman dan Midgley (1982), mengemukakan tiga cara pendekatan yaitu : (1) garis kemiskinan, (2) indikator kesejahteraan, dan (3) pengukuran ketimpangan.

c. Pro Kontra Terhadap Prostitusi Sumberpucung.

Pandangan warga Sumberpucung dengan kehadiran praktik prostitusi itu terkonsentrasi jadi dua kelompok, yakni; kelompok pendukung dari MUI dengan pendukung lokalisasi yang diperkuat dengan Surat Instruksi NO 3 Tahun 2002 Bupati Malang yang mengatakan bahwa semua lokalisasi prostitusi di Kabupaten Malang ditutup.

Dalam berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Malang, penulis menanggapi; " Surat Instruksi tersebut pada prakteknya bermaksud membiarkan lokalisasi tetap bertumbuh subur sebagai suatu usaha untuk menyerap tenaga kerja perempuan dan PEMDA sendiri akan berpura-pura tutup mata dan tidak akan mempersoalkan praktik-praktik prostitusi, serta bersikap seakan-akan tersandra dengan Surat Instruksi tersebut".

Konsekwensi dari Surat Instruksi tersebut; PEMDA Kabupaten Malang tidak ada pelayanan, pembinaan bagi pelacur yang ada di lokalisasi maupun pelacur yang berpraktek di tempat lain. Setelah penulis mengkonfrontir dengan realitas lapangan ternyata di Kabupaten Malang masih ada sekitar 7 lokalisasi, maka Eksekutif maupun Legislatif heran merasa kecolongan.

Praktek prostitusi menjamur di Kabupaten Malang hingga kini belum ada usaha usaha preventif atau usaha lain yang memberi efek jera bagi pelacur,

Prostitusi Dan Kemiskinan
(Lokalisasi Desa Sumberpucung Kabupaten Malang)

mucikari serta penikmat dalam bentuk PERDA penanggulangan pelacuran sebagaimana adanya PERDA AIDS/HIV. Eksekutif dan Legislatif sepertinya telah kehabisan waktu memikirkan pelacuran. Mengaku sampai dengan sekarang belum ditemukan cara paling efektif menekan bertumbuh suburnya pelacuran yang kian menjamur tidak terkendali. Ada dugaan kuat pelacuran sebagai salah satu bentuk solusi jalan pintas mengatasi masalah ekonomi keluarga yang menjadi alasan perempuan melacur.

Menanggapi kehadiran Surat Instruksi NO 3 Tahun 2002 Bupati Malang, Eksekutif maupun Legislatif melihat itu masih relevan dan sangat dibutuhkan, alasan :

1. PEMDA Kabupaten Malang belum bisa menyediakan pekerjaan pengganti bagi pelacur juga mucikari,
2. Mempermudah pengawasan pelacur jika terkena penyakit HIV/AIDS,
3. Melokalisir pelacur agar supaya tidak berkeliaran, untuk menghindari demo dari pendukung lokalisasi, belum ada petunjuk dari pusat (Jakarta).

Dualisme sikap Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Malang menghadapi prostitusi dan lokalisasi mengakibatkan : (1) PEMDA Kabupaten Malang tidak memiliki data akurat tentang jumlah pelacur, (2) PEMDA Kabupaten Malang tidak memiliki data akurat tentang jumlah pengidap penyakit HIV/AIDS.

KESIMPULAN

1. Hampir setiap penguasa negeri ini tidak serius menangani orang-orang miskin. Angka orang miskin bisa dipermainkan hanya sekedar menyenangkan hati rakyat dengan harapan menopang popularitas diri.
2. Terperangkap stigma dengan banyak argument yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai faktor tunggal pemicu prostitusi. Jika pendapat tersebut benar, bagaimana dengan prostitusi yang ada di negara-negara maju, seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu berdasarkan kajian literatur, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor jadi pemicu prostitusi/pelacuran selain daripada

kemiskinan, yakni : (1) marginalisasi desa dan pertanian, (2) faktor pendidikan, (3) perubahan sosial (perubahan struktur dan pranata sosial), (4) interaksi sosial, (5) perilaku menyimpang.

3. Desa Sumberpucung tidak masuk dalam kualifikasi desa miskin. Mayoritas warga melihat kehadiran lokalisasi prostitusi tidak memberi nilai positif bahkan berdampak negatif. Arogansi kekuasaan melestarikan lokalisasi, dipertegas dengan kehadiran dari Babinsa, maupun aparat desa sebagai penanggung jawab keamanan lokalisasi.
4. Adanya dualisme sikap Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Malang mencermati lokalisasi prostitusi dengan berusaha tetap mempertahankan Surat Instruksi NO 3 Tahun 2002 Bupati Kabupaten Malang, walaupun Surat Instruksi tersebut kontra produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiman, Margareth and James Midgley, 1982. **The Social Dimension of Development**, John Willey & Sons Ltd, New York.
- Kartono, Kartini 1983, 2009. **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**. CV. Mandar Madju. Bandung.
- Kuntjoro. 2004. **On The Spot. Tutur dari Seorang Pelacur**. Yogyakarta. Tinta.
- 1896. **Pengantar Antropologi**. Universitas Jakarta.
- Soemardjan S. 1980, **Social Chance in Jakarta**.
..... 1982, **Perubahan Sosial di Yogyakarta**: Gadjah Mada University.
- Susanto, Astrid S, 1984, **Sosiologi Pembangunan**, Bina Cipta, Bandung.